

MENGUNGKAP PEMIKIRAN PADA PONPES MODERN DARUN NAIM PONTIANAK TERHADAP INTERNET BAGI SANTRI

Syarifah Fatimah
IAIN Pontianak, Indonesia
Email: fathimahabubakar@rocketmail.com

Diterima Tanggal: 20 November 2018

Selesai Tanggal 26 Mei 2019

ABSTRACT

This study wants to reveal the Islamic thinking of the Darun Naim Pontianak Islamic Boarding School in assessing the existence of the internet. This study seeks to explore and reconstruct the object of research through analyzing the findings of data in the field to obtain critical descriptions of the internet and Darun Naim. Therefore, this research was conducted using descriptive methods and qualitative approaches. The approach is used to express the deepest value of the object of research. The research data was obtained through interviews and fact findings in the field. As a result, Darun Naim considered that the internet as a technology could not be given to santri, because of the potential for mafsadat which could damage their forging process as clerics. In order for global knowledge and insight, the santri were allowed to control the internet. The results of these studies provide knowledge and offer at the same time advanced research related to ICT and Islamic boarding schools in the context of globalization for scientific development and community service.

[Penelitian ini ingin mengungkap pemikiran Islam Pondok Pesantren Darun Naim Pontianak dalam menilai keberadaan internet. Penelitian ini berusaha menggali dan merekonstruksi objek penelitian melalui analisis temuan data di lapangan sehingga diperoleh deskripsi kritis tentang internet dan Darun Naim. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan itu digunakan untuk mengungkapkan nilai terdalam dari objek penelitian. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dan temuan fakta di lapangan. Sebagai hasilnya bahwa Darun Naim menilai internet sebagai teknologi belum bisa diberikan kepada santri, karena adanya potensi *mafsadat* yang dapat merusak proses penempaan mereka sebagai ustadz. Dalam rangka untuk pengetahuan dan wawasan global, para santri diizinkan secara terkontrol untuk menggunakan internet. Hasil penelitian tersebut memberikan pengetahuan dan sekaligus menawarkan penelitian lanjutan terkait TIK dan pesantren dalam kontek globalisasi untuk pengembangan keilmuan dan pengabdian kepada masyarakat].

Kata Kunci: Pondok Pesantren Darun Naim, Internet dan Ilmu Pengetahuan

PENDAHULUAN

Pondok pesantren (Ponpes) sebagaimana diketahui umum dikenal sebagai tempat menimba ilmu agama dan sekaligus pelatihan serta pembersihan diri. Pada prinsipnya, learning outcomes setiap

Ponpes diproyeksikan menjadikan santri sebagai ulama, ustadz, atau kiai.¹ Pada

¹ Sholeh So'an, *Tahlilan: Penelusuran Historis Atas Makna Tahlilan di Indonesia*, (Bandung: Agung Ilmu, 2002), hlm. 83-84. Lihat juga Mas'ud, Abdurrahman. "Pesantren dan Walisongi: Sebuah Interaksi dalam Dunia

perkembangannya, lembaga pendidikan tersebut tidak dapat bertahan untuk tetap berdiri sebagaimana awal, murni sebagai tempat menimba ilmu agama, karena perubahan zaman menuntut mereka untuk adaptasi.²Santri dalam format globalisasi dituntut tidak hanya ahli ilmu agama tetapi sekaligus menguasai ilmu umum. Penguasaan ilmu agama semata secara sosiologi dakwah akan mengisolasi santri dari masyarakat, terpinggirkan ditepi zaman. Suasana demikian itu tampak telah dirasakan Ponpes yang ditandai dengan usaha untuk bersikap adaptif terhadap zaman.

Di antara teknologi utama penopang zaman adalah internet. Pada abad ini, internet tidak diragukan telah menciptakan banyak manfaat di masyarakat, mulai sektor rumah tangga, perkantoran, perdagangan, sampai pemerintahan. Internet sebagai teknologi secara nyata mampu terus menggerakkan zaman.³Meskipun demikian, internet

merupakan teknologi. Secara aktual, teknologi tersebut di saat sama digunakan untuk keperluan yang bernilai tidak selaras dengan agama, bermula ketikainternet menyediakan ruang bagi keperluan informasi dan hiburan. Pada saluran itu, terdapat konten yang dinilai bermasalah, seperti pornografi, pornoaksi, berita hoax, dan kekerasan atau bentuk penyimpangan sosial lain.⁴Konten demikian itu menurut Islam dipastikan terlarang untuk dikonsumsi muslim, karena nash agama dan potensi kerusakan yang mengikutinya.

Ponpes moderen terkait relasinya dengan internet secara nyata segera dihadapkan pada suatu masalah, karena institusi pendidikan agama tersebut memiliki peran untuk mencetak lulusan yang diproyeksikan menjadi ulama. Proses realisasi learning outcomes demikian itu memerlukan pelatihan spiritual yang terawasi dan terukur guru, bukan sekedar selesaikan beban studi, raih nilai kelulusan, beserta ijazahnya. Internet secara akademis kepesantrenan menjadi berpotensi kontra produktif bagi pendidikan agama di lingkungannya.⁵

Pendidikan” dalam *Islam dan Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Gama Media, 2000.

² Lihat Ali, Suryadharma. *Epistemologi Kajian Islam Indonesia: Memperluas Horizon Kajian Islam Menjawab Tantangan Perubahan*. Malang: UIN Maliki, 2013.

³Sebuah artikel menarik tentang teknologi internet ditulis Hanvitra dalam Kompasiana dengan judul *Ketika Internet Menguasai Dunia*. Di dalam artikel tersebut ditulis tentang masa depan dunia yang menurut pembacaannya akan dikuasai internet, karena teknologi itu akan berkembang cepat dan mempengaruhi gaya dan pola hidup. Kebutuhan terhadap internet dan ponsel dituliskannya akan menjadi kebutuhan primer yang sejajar dengan papan, sandang, dan pangan. Hanvitra,

Ketika Internet Menguasai Dunia dalam <https://www.kompasiana.com>.

⁴ Di dalam konteks itu pemerintah perlu membuat regulasi. Di antaranya adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Thn. 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁵ Pada dasarnya masih banyak pesantren yang bersifat menutup diri terhadap moderenitas. Sejumlah ahli menilai sikap tertutup pesantren berasal dari warisan masa kolonial. Sikap tersebut

Masalah internet di atas tentu ditemukan di lembaga Darun Naim sebagai Ponpes moderen di Pontianak. Suatu masalah dalam relasinya dengan pembelajaran santri selama di pesantren. Ponpes itu didesain sebagai pesantren salaf yang bersifat moderen.⁶ Status tersebut menuntut institusi pendidikan tersebut mampu terus beradaptasi terhadap zaman, karena konsep moderen mengharuskan keterbukaan terhadap perubahan. Darun Naim dalam rangka mencetak santri berkualitas secara pasti berhadapan dengan masalah internet.

Permasalahan Darun Naim di atas secara akademis menarik untuk dijadikan objek studi dalam rangka menemukan konstruksi berpikir yang terwujud pada lembaga. Di saat sama, masalah tersebut mengundang kegelisahan akademis ketika internet di tengah Dunia Ponpes yang wujudnya terepresentasikan dalam gadget atau smart phone terhitung dinilai cukup kontroversial, karena potensi kontra produktif yang terkandung di dalamnya. Darun Naim di dalam batas tertentu dapat diposisikan untuk mewakili pemikiran Dunia Ponpes terhadap masalah internet.

Studi masalah tersebut diharapkan menghasilkan konstruksi pemikiran Ponpes moderen tentang internet di tengah perkembangan zaman.

Pondok Pesantren di Pontianak

Di dalam sejarah lokal, kemunculan lembaga pendidikan agama Islam di Pontianak mulai muncul di perempat awal abad XX M, tetapi bukan dalam bentuk pondok pesantren. Di rentang masa itu, sebuah madrasah dibangun dan dikelola kesultanan Pontianak. Madrasah tersebut berdiri di depan Istana Kadriyah dengan nama Abdurahmaniyah, terambil dari nama pendiri kota. Abdurahmaniyah didesain laiknya sekolah moderen, tidak bersifat tradisional. Hal itu ditandai dengan penerapan kurikulum, sistem klasikal, evaluasi pembelajaran, sampai busana seragam madrasah. Pada masa itu, madrasah tersebut baru di tahap sekolah dasar, belum memasuki tingkat lanjutan. Mata pelajaran meliputi materi bahasa arab, al-quran, al-hadits, matematika, geografi, sejarah, dan bidang ilmu lainnya, termasuk kegiatan ekstra kulikuler Pramuka. Banyak anak muslim Pontianak dari pelbagai kalangan mengikuti kelas tersebut. Di dalam rangka memajukan kualitas pembelajaran didatangkan sejumlah tenaga pengajar dari manca

masih dianut banyak pesantren hingga mereka dinilai kolot dalam merespon moderenitas zaman dan konservatif. Hanun Asrohah, Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 186

⁶ Lihat Tim, *Profil Pondok Pesantren Darun Naim*. Pontianak: Ponpes Darun Naim, tnp. Tahun.

negara, seperti India, Mekah, dan Mesir.⁷ Setiap evaluasi pembelajaran dilaporkan ke orang tua murid dalam bentuk lembaran sertifikat nilai. Namun, keberadaan Abdurrahmaniyah tidak lama, karena sejarah madrasah tersebut berakhir akibat invasi Jepang ke Kalimantan Barat yang menghancurkan tatanan masyarakat, termasuk kesultanan Pontianak.⁸ Setelahnya, madrasah tersebut tidak lagi hadir untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat.

Di kurun waktu sama, suatu madrasah bernama Perguruan Islamiyah didirikan H. M. Arif di Kampung Bangka Pontianak Selatan. Madrasah tersebut bermula dari majelis pengajian anak-anak yang digelar di rumah, berawal tahun 1926. Pembelajaran dilangsungkan di sore hari, karena di paginya mereka harus mengikuti Sekolah Rakyat. Di tahun 1931 M, sebuah bangunan baru didirikan khusus untuk madrasah, bernama Sekolah

Islamiyah. Di dalam perjalanannya, Perguruan Islamiyah terus mengadakan pembenahan diri sehingga mampu mengembangkan pendidikan madrasah dan sekolahan dalam pelbagai tingkatan.

Pembacaan sejarah di atas memberikan informasi bahwa Pontianak di perempat kedua abad XX M telah memiliki lembaga pendidikan madrasah dan terus bermunculan di pertengahan abad tersebut. Tahun 1954 M, lembaga pendidikan bernama Persatuan Madrasah-Madrasah Islam Indonesia (PERMI) berdiri di Pontianak. Selain itu terdapat madrasah yang dikelola Badan Wakaf al-Madrasah al-Arabiyah Islamiyah (BAWAMAI). Madrasah itu didirikan di tahun 1957 M. Sejumlah pengusaha keturunan Arab di Pontianak menjadi pendiri madrasah BAWAMAI. Sementara, Muhammadiyah memilih membangun sekolah umum. Namun, kurikulumnya terisi dengan materi keilmuan Islam. Sedangkan, Yayasan Mujahidin yang kehadirannya dipelopori aktivis muslim Kota Pontianak mengembangkan madrasah dan sekolahan umum, terhitung mulai tahun 1980 M. Secara umum, Pontianak di masa lalu memiliki cukup madrasah untuk memenuhi keperluan pendidikan masyarakat muslim.

Di tengah perkembangan madrasah di atas Ponpes belum muncul, kecuali setelah tahun 1970-an. Masyarakat muslim

⁷Di Sambas terdapat Madrasah As-Sultaniyah yang kemudian berubah nama menjadi Tarbiyatul Islam. Madrasah tersebut telah berdiri sejak tahun 1922 M. Sejumlah ilmu agama dan ilmu umum telah diracik menjadi suatu kurikulum bagi siswa. Di dalam pengelolaannya As-Sultaniyah telah menerapkan prinsip-prinsip moderen, tidak lagi bersifat tradisional. Di antara ustadz besarnya adalah Haji M. Basiuni Imran. Sementara di Mempawah, lahir madrasah Najah wal Falah di tahun 1918 M, tepatnya di Bakau Besar. Madrasah tersebut kemudian berkembang menjadi Ponpes yang diklaim sebagai pesantren tertua di Kalimantan Barat.

⁸ Lihat Anshar Rahman, *Sejarah Perjuangan Rakyat Kalimantan Barat 1908-1950*. Pontianak: Pemerintah Daerah Tk. I Kalbar, 1991.

Kota Pontianak tampak kurang tertarik mengelola institusi tersebut sehingga mereka lebih memilih untuk mendirikan madrasah. Meskipun demikian, sebagian anak mereka telah mengenyam pendidikan Ponpes di Jawa, terkadang berlanjut ke Timur Tengah. Oleh sebab itu, madrasah banyak bermunculan di Pontianak di awal abad ke XX, tanpa diikuti dengan kemunculan Ponpes.⁹

Persoalan kebudayaan diperkirakan menjadi suatu kondisi yang tidak segera mendorong tumbuh-kembangnya institusi Ponpes di Pontianak. Masalah alam, lingkungan, dan sumber daya manusia diperkirakan menjadi penghambat utama.¹⁰ Di pelbagai daerah, dasar-dasar pengetahuan agama diperoleh di masjid dan surau. Sementara, pendidikan keilmuan Islam tingkat lanjutan diperoleh

dari luar daerah.¹¹ Sultan Pontianak diinformasikan memiliki asrama di Mekah bagi jamaah haji asal Pontianak yang sekaligus difungsikan untuk muslim dalam memperdalam ilmu agama. Sebagai kepala pengelolanya adalah Syaikh Abdullah bin Shaleh al-Zawawi.¹² Kemapanan muslim Pontianak menjadikan surau dan masjid sebagai tempat belajar-mengajar tampaknya membuat mereka tidak segera pindah ke Ponpes.

Kelangkaan Ponpes di Kalbar bukan berarti memberikan kesimpulan bahwa ulama di masa lalu tidak peduli terhadap pendidikan agama. Ustadz H. Ismail Mundu bin Daeng Abdul Karim di Teluk Pakedai di pertengahan abad ke XIX telah mendirikan lembaga pendidikan agama Islam, tepatnya tahun 1955 M. Namun, lembaga pendidikan tersebut dikembangkan bukan dalam bentuk pondok pesantren, karena tidak ada asrama santri. Lembaga tersebut dikenal bernama Madrasah Diniyah Ismail Mundu. Anak-anak Teluk Pakedai belajar agama di madrasah diniyah tersebut. Mereka belajar

⁹ Setiap daerah memiliki kekhasan tersendiri dalam mengembangkan pendidikan Islam. Hal demikian itu seperti di Aceh yang mengenal lembaga Dayah bukan pesantren. Detail tentang Dayah lihat Eka Srimulyani, *Islamic Schooling In Aceh: Change, Reform, and Local Contexts* dalam *Studia Islamica*, Vol. 20 Number 3, thn. 2003. hlm. 468 – 474.

¹⁰ Alam Kalimantan yang masih diliputi hutan dan berawa-rawa merupakan hambatan bagi masyarakat untuk mengelola Ponpes yang menyediakan asrama bagi anak-anak santri. Hal demikian itu berdampak pada kebutuhan air minum yang bergantung pada air hujan. Sementara, dukungan infrastruktur belum memadai untuk menyelesaikan masalah alam Kalimantan, termasuk di dalamnya masalah listrik. Masalah tersebut sampai hari ini masih menjadi hambatan bagi para pengelola Ponpes di Pontianak, terlebih lagi di abad lalu.

¹¹ Sebagai contoh adalah Haji Muhammad Basiuni Imran Sambas yang di dalam riwayatnya tercatat pernah belajar ke Mekah, bahkan terus berlanjut ke Mesir. Lihat Zulkifli, “Aktivitas Dakwah Maharaja Imam Sambas Haji Moehammad Basioeni Imran” dalam *Orasi Ilmiah: Yudisium Sarjana Fakultas Adab dan Dakwah*, tidak diterbitkan, Pontianak, 19 Juli 2018.

¹² Lihat Martin van Bruinessen, *Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 78.

baca tulis al-Quran, bahasa Arab, aqidah, dan fiqih. Di batas itu, keberadaannya lebih menyerupai pesantren salaf, karena tidak adanya kurikulum dan pengajaran keilmuan umum. Mereka cukup memproyeksikan terbentuknya generasi muslim shalih di Teluk Pakedai. Pada perkembangan terakhirnya, Madrasah Diniyah Ismail Mundu tergerus zaman. Meskipun demikian, sejarah singkat Ustadz H. Ismail Mundu dan madrasahnyanya menginformasikan tentang kepedulian ulama Kalimantan Barat terhadap lembaga pendidikan agama di masyarakat.¹³

Ketiadaan Ponpes di Kalimantan Barat membuat Ustadz Shalehal-Haddad seorang ulama lokal menggulirkan ide dan gagasan pendirian pesantren di Pontianak. Tahun 1950-an, ia menyiapkan sebidang tanah-waqafnya guna mendirikan Ponpes di Pontianak. Perencanaan tersebut gagal tercapai, karena ada halangan dari pemerintah daerah.¹⁴ Di batas itu, rencana pendirian Ponpes sering digulirkan ke tengah muslim agar mereka

menindaklanjuti ide yang dinilainya penting bagi masa depan Islam di Kalimantan. Di dalam kepentingan sama, ia menguatkan sejumlah ustadz untuk bertahan dan terus berjuang membangun Ponpes. Di antaranya adalah Ustadz Chairuman Arrahbinidari Malang. Di kemudian hari, ia berhasil mendirikan Ponpes Darul Ulum di Kubu Raya, terhitung sejak 1977 M.¹⁵ Di awal tahun 1980 M, Ust. Shaleh meyakinkan Ustadz Ridha bin Yahya dari Jawa Tengah untuk menetap di Pontianak guna kepentingan dakwah. Di saat sama, ia mengajak muslim untuk bekerjasama dalam rangka kepentingan tersebut, sehingga terbangun dukungan kepada aktivitas ustadz. Di kemudian hari, pemikiran tersebut akhirnya melahirkan Ponpes as-Salam di Paal V Pontianak.¹⁶

Ponpes al-Jihad adalah contoh kelahiran pesantren di Pontianak yang dipelopori pendatang dari Madura. Seorang kiai muda bernama Abdul

¹³Madrasah Diniyah Ismail Mundu belum mencapai masa kejayaannya karena dua tahun setelah kelahirannya ditinggal pendirinya. H. Ismail atau lebih dikenal sebagai mufti kerajaan Kubu meninggal di tahun 1957. Detail biografi Ismail Mundu lihat Rivai bin Abbas, *Riwayat Hidup al-Marhum al-Fadhil al-Haji Ismail Mundu*, Pontianak, tanggal 11 Februari 1984.

¹⁴Status Ust. Shaleh sebagai pendatang dari Yaman yang menurut pemerintah daerah belum secara sah diakui sebagai warga negara Indonesia membuat penguasaan tanahnya di Sei Jawi dipermasalahkan dengan dalih undang-undang agraria.

¹⁵Sebelumnya, Ustadz Chairuman pernah mendirikan Ponpes di daerah Kabupaten Landak. Di kemudian hari, ia merasa berat untuk bertahan di Kalimantan, sehingga berkeinginan untuk kembali ke Malang Jawa Timur. Keinginan tersebut dibatalkan setelah dirinya peroleh nasehat dan motivasi dari Ust. Shaleh al-Haddad. Ia lalu kembali berusaha mendirikan Ponpes di Kubu Raya, bernama Darul Ulum. Ponpes tersebut dianggap sebagai pesantren tua dan besar di Kalimantan Barat.

¹⁶Detail tentang peran Habib Shaleh lihat Abu Bakar dan Fatimah, Habib Shaleh al-Haddad: Jihad dalam Dakwah Islamiyah di Kalimantan Barat (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018).

Muthalib dari Sampang Madura mulai merintis Ponpes tersebut untuk pertama kali di Pontianak. Di bawah bayangan kultur Madura, al-Jihad segera berkembang sebagai Ponpes mapan di tengah masyarakat. Desain awal Ponpes diperuntukan bagi fakir miskin dan anak yatim. Kepemimpinan Kyai Abdul Muthalib mampu menarik banyak santri, tidak hanya dari Kota Pontianak. Di sejarahnya, al-Jihad menjadi Ponpes tertua di Pontianak, terhitung mulai tahun 1976.

Sebagian santri-santri generasi awal Ponpes Pontianak yang melanjutkan ke luar daerah di kemudian hari mendirikan Ponpes. Mereka menjadikan Ponpes lokal sebagai tahapan dasar untuk persiapan memasuki lembaga pesantren di Jawa atau Timur Tengah. Sebagai contoh adalah Ust. Muhammad Alfian atau Abud pendiri Ponpes Darul Mafahim di Paal V Pontianak Barat. Ia merupakan santri periode awal al-Salam di Paal V tahun 1980-an. Setelah peroleh dasar ilmu agama, studinya dilanjutkan ke Ponpes Riyadhul Jannah Pacet Mojokerto Jawa Timur. Secara lebih lanjut, ia meneruskan belajarnya ke Ponpes Manbaul Ilmi di al-Rushaifah Mekah pimpinan Sayid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Ia sekembalinya dari Mekah mendirikan Ponpes Darul Mafahim. Ust. Thaha al-Jufri pendiri Ponpes Faqih Muqaddam di

Parit Gondang Legi Desa Durian Sei Ambawang merupakan contoh lain. Ia peroleh pendidikan dasar agamanya di Ponpes Hidayatus Shibyan Parit Percis Tembang Kacang Kubu Raya kemudian berlanjut ke Darul Lughah wa al-Dakwah di Bangil Pasuruan untuk peroleh pendalaman ilmu agama. Setelah itu, ia masuk ke Ponpes Darul Musthafa di Tarim Hadramaut Yaman. Di kemudian hari, ia mendirikan Ponpes Faqih Muqaddam.

Sejumlah alumni Jawa lainnya turut mendirikan Ponpes di Pontianak. Ust. Abdurrahman alumni Ponpes YAPI Bondowoso di tahun 2001 mendirikan Ponpes Mambaus Shafa di Kampung Arab Pontianak Timur. Sementara, sejumlah Ponpes lain didirikan alumni Dalwa pimpinan Ust. Hasan. Ponpes Ulin Nuha di Pontianak Utara didirikan Ust. Fayshal Riza, tepatnya di Gst. Situt Mahmud Siantan Hulu. Ponpes al-Hasani di Jl Martadinata di Pontianak Barat didirikan Ust. Ramli Zakki. Ponpes Mu'tashim Billah didirikan baru Ust. Zayni Yahya di Purnama II Ujung Pontianak Selatan. Alumni Dalwa lain mendirikan Ponpes di sekitar Kota Pontianak. Ustadz Iskandar mendirikan Ponpes Maulana Sulthan Muhammad di Selat Panjang Kubu Raya. Di Mempawah, terdapat dua Ponpes yang didirikan oleh Ust. Zulqarnayn di Penibung dan Ust. Syadzili di Nusa Pati.

Ust. Muntaha Ridha mendirikan Ponpes Darul Musthafa di Sei Pinyuh. Mereka merupakan generasi ustadz alumni Dalwa yang turut mendirikan Ponpes di Pontianak dan daerah sekitarnya.¹⁷

Di era generasi di atas perkembangan Ponpes di Pontianak terasa cukup signifikan. Hal demikian itu terukur dari daftar Ponpes yang terregistrasi di kantor kementerian agama. Pontianak di kemudian hari diperkirakan akan terus menerima pesantren baru, terindikasi dari keberadaan Ponpes yang masih belum terdaftar di kementerian agama, karena tahap perintisan-pembangunan.

Ponpes Modern Darun Naim Pontianak

Tahun 2002 M, Ponpes Darun Naim di Sei. Jawi Kec. Pontianak Kota muncul sebagai Ponpes baru di Kota Pontianak Kalimantan Barat. Ponpes tersebut didirikan Ustadz Ridha bin Yahya. Setelah mengundurkan diri dari Ponpes as-Salam, ia segera mengelola pesantren barunya, tepatnya di Jl. Ampera. Darun Naim dipahami sebagai wujud keberkahan dari nasehat Ustadz Shaleh al-Haddad di tahun 1980. Di dalam cita-citanya, Ponpes tersebut didesain sebagai pesantren moderen, tetapi masih mempertahankan

doktrin salafiyah, sehingga tampil berbeda dengan lainnya. Desain tersebut tentu menjadi yang pertama di Kalimantan Barat. Kepemilikan lembaga yang bersifat perseorangan tersebut membuatnya lebih bebas untuk mengembangkan Darun Naim sesuai desainnya. Tahun 2005 M, Darun Naim dinyatakan secara resmi berdiri sebagai Ponpes Salafi-Moderen di Pontianak.

Darun Naim segera dibangun dengan semangat mendialogkan eksistensi pesantren sebagai institusi tradisional dengan zaman yang diliputi moderenitas.¹⁸ Pada zamannya, Darun Naim dibangun di daerah pinggiran, tetapi masuk dalam rancangan zona pengembangan kota. Hitungan tersebut telah dipertimbangkan pendiri Ponpes. Oleh sebab itu, bentuk fisik Darun Naim terdesain cukup megah, berdiri selaras dengan tata ruang kota Pontianak di sepanjang Jln. Ampera, tidak mengesankan tertinggal zaman. Di dalam desainnya, Ponpes tersebut akan diisi dengan pengajaran ilmu salaf. Kitab-kitab kuning standar pesantren Indonesia tetap dipertahankan sebagai buku bahan ajar ustadz kepada santri. Pada saat sama, Darun Naim membangun sekolah muadalah, berbentuk Madrasah

¹⁷ Data tentang pesantren di Pontianak lihat Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kota Pontianak, Data Pondok Pesantren Se-Kota Pontianak Tahun 2018 (Pontianak: Kemenag Kota Pontianak, 2018).

¹⁸ Lihat Tim, *Profil Pondok Pesantren Darun Naim* (Pontianak: Ponpes Darun Naim, tnp. tahun), hlm. 3-4. Lihat juga Tim, Brosur Pondok Pesantren Darun Naim. Pontianak: Ponpes Darun Naim, tnp. Tahun.

Tsanawiyah dan Aliyah. Kurikulum Pendidikan Nasional diterapkan sebagai kerangka acuan pembelajaran santri. Sementara, Ponpes sebagai organisasi dibangun berdasarkan prinsip rasionalitas. Fisik bangunan, tata kelola pesantren, santri, guru, dan pegawai, sampai manajemen organisasi turut dibangun berdasarkan pada tata kelola yang baik. Secara lebih lanjut, terkait dengan kepentingan santri, Darun Naim merumuskan paket ekstrakurikuler berbasis ilmu atau keahlian praktis yang dinilai relevan dan signifikan bagi kebutuhan zaman. Sejak awal, seluruh rancangan tersebut dirumuskan sebagai respon terhadap perkembangan di masyarakat, baik lokal maupun regional.¹⁹

Pandangan filosofis Darun Naim tentang eksistensinya di masyarakat tercermin dalam rumusan misi lembaga. Misi tersebut terumuskan secara besar dalam buku profil lembaga.

“Melaksanakan pendidikan Pondok Pesantren yang selalu berorientasi pada mutu secara keilmuan maupun secara agama sehingga mampu menyiapkan sumber daya insani yang berkualitas di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta di bidang iman dan taqwa.”²⁰

¹⁹ Lihat Kurikulum Madrasah Diniyah Ponpes Darun Naim Putra Tahun Pelajaran 2018/2019. Pontianak: Ponpes Darun Naim, tnp. Tahun. Lihat juga Jadwal al-Dirasah al-Diniyah Bi Ma'had Darun Naim Amu al-Dirasiy 1439/1440. Pontianak: Ponpes Darun Naim, tnp. Tahun. .

²⁰ Lihat Tim, *Profil Pondok Pesantren...* hlm. 6.

Ilmu pengetahuan umum dan agama dalam rumusan misi di atas ditegaskan secara eksplisit sebagai penekanan terhadap peran lembaga di tengah perkembangan masyarakat yang terus meninggalkan tatanan tradisional.

Moderenitas Darun Naim dapat dirujuk kepada beberapa hasil kajian sarjana. Mereka melalui sejumlah studi telah menghasilkan landasan teoritis dalam perumusan pengertian Ponpes moderen. Dzamakhsyari Dofier menempatkan karakter keterbukaan lembaga pesantren terhadap perubahan zaman sebagai penentu pembagian antara Ponpes salaf dan khalaf atau tradisional dan moderen.²¹ Sementara, Dawan Raharjo merumuskan pembagian Ponpes moderen atau tradisional didasarkan pada pola dan bentuk umum kepemimpinan, termasuk di dalamnya sistem, materi, relasi kyai dan santri, hingga bentuk aktivitas keseharian santri.²² Selain itu, terdapat peneliti mencoba memotret modernisasi Ponpes berdasarkan pada bentuk sarana dan prasana, kurikulum, dan metode pembelajaran yang dikembangkan

²¹Lihat Dzakamkhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 44.

²²Lihat Dawam Rahardjo, “Gambaran Pemuda Santri: Penglihatan dari Jendela Pesantren Pabelan” dalam Taufik Abdulah, *Pemuda dan Perubahan Sosial* (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 208.

pesantren.²³ Secara lebih lanjut, nilai multikulturalisme turut dijadikan sebagai ukuran menentukan ciri Ponpes moderen.²⁴ Pada batas-batas pengertian tersebut, Darun Naim dalam pelbagai segi dapat dikatakan sebagai Ponpes moderan.



Gambar 1
Masjid Darun Naim di Jalan Ampera
Pontianak

Moderenitas Darun Naim tergambar secara lebih baik pada tata pengelolaan lembaga. Institusi tersebut digerakan oleh sistem, tidak lagi bergantung kepada ustadz. Pada lembaga tradisional, ustadz sering menempati posisi sentral, karena perannya meliputi pemimpin dan sekaligus regulator. Ia berada di atas bangunan sistem, sehingga pelbagai urusan dalam kendalinya. Model

²³Lihat Ardian Asyhari, dkk. "Respon Ponpes Diniyah Putri Terhadap Modernisasi Pendidikan Islam" dalam *Tadris: Journal Pendidikan Islam*, Vol. 12, No. 2, 2017, (ejournal.stainpamekasan.ac.id).

²⁴Lihat Ahmad Taufiq Abdurrahman, "Pesantren Moderen dan Pendidikan Multikulturalisme: Observasi atas Sistem Pendidikan di Ponpes Moderen Darussalam Gontor dan al-Amien Prenduan" dalam (www.academia.edu).

kepemimpinan tradisional tidak diterapkan di Darun Naim.²⁵Tata aturan pesantren memiliki kekuatan, sehingga harus ditaati setiap unsurnya. Ketaatan itu terlihat pada ketundukan seorang pemimpin lembaga beserta keluarga dan kerabatnya atau pejabat pada sistem. Hal demikian itu dicontohkan Ustadz Ridha selaku pendiri Ponpes. Ia dikenal memiliki kedisiplinan tinggi terhadap penegakan aturan lembaga.²⁶ Di tingkat tata kelola organisasi, moderenitas tampak telah menyangga aktivitas Darun Naim.

Hal sama pada pengelolaan santri yang dirancang berdasarkan sistem pengaturan. Peraturan tidak lagi disuarakan oleh perintah dan larangan pegawai, petugas, atau ustadz. Mereka telah diberi buku panduan yang berisi serangkaian ketentuan, mulai dari prosedur pendaftaran (tes seleksi, pengumuman, registrasi, ketentuan santri baru), aturan

²⁵ Model kepemimpinan tradisional dan rasional diperkenalkan Max Weber dalam studi sosiologinya. Hal tersebut dapat dilihat pada Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 293-324.

²⁶ Sebagai contoh adalah kedisiplinan Ustadz Ridha terhadap waktu untuk mengelola Ponpes. Ia tidak bergeser dari jadwal. Di antara contoh lain adalah keharusan keluarga pendiri dan pengurus Darun Naim untuk tetap dikenai administrasi dan beban biaya ketika mereka sekolah di bawah Yayasan Darun Naim. Mereka dalam hal tata kelola diperlakukan sebagaimana keharusan yang digariskan organisasi. Hal demikian itu tentu berbeda dengan sejumlah pesantren lain yang terkadang memberikan perlakuan istimewa atau pengecualian terhadap pimpinan dan atau keluarga pemilik lembaga.

dasar dan umum, kewajiban santri, larangan santri, kedisiplinan dan sanksi pelanggaran, sampai peraturan tambahan. Buku panduan tersebut seperti buku pedoman akademik mahasiswa, berisi lengkap tentang panduan selama perkuliahan. Setiap santri tidak direpotkan dengan pencarian informasi, karena buku panduan berada di tangannya. Secara bersamaan, Ponpes tidak perlu direpotkan dengan sosialisasi. Pola pengaturan demikian di tingkat pesantren terhitung masih langka, kecuali di lembaga sekolah.²⁷

Pola hidup keseharian santri Darun Naim dikondisikan secara baik sehingga aneka kegiatan mereka tidak terkendala. Pasokan air yang memadai bagi keperluan santri. Listrik cukup untuk memenuhi hajat di malam dan siang hari. Tempat olah raga disediakan dan terbuka umum. Ruang kamar yang laik huni diberikan untuk kenyamanan santri. Mereka tidak dibebani aktivitas kebutuhan pribadi, seperti mencuci pakaian. Urusan makanan menjadi tanggungan petugas lembaga. Secara umum, lingkungan Ponpes terlihat bersih dan cukup indah. Suasana dan layanan pesantren tersebut dibangun untuk membentuk pola kehidupan santri yang mendukung kegiatan santri dalam belajar.

²⁷ Detail tentang tata aturan bagi santri di atas dapat dilihat pada Buku Panduan Santri Ponpes Darun Naim, terlampir dalam penelitian.

Moderenitas Darun Naim dapat diukur dari sikap keterbukaannya terhadap dinamika perkembangan di masyarakat. Sebagaimana disampaikan terdahulu bahwa keterbukaan pesantren dapat dijadikan tolak ukur pengklasifikasian antara Ponpes moderen dan tradisional atau salaf dan khalaf. Hal itu tentu berkaitan dengan cara pandang pengelola lembaga, tidak hanya dalam urusan tata kelola, melainkan sekaligus meliputi respon terhadap permasalahan aktual. Dinamika di tengah masyarakat dinilai penting untuk diserap guna ditindaklanjuti dalam bentuk program kerja, karena penyerapan tersebut akan menjadikan lembaga hadir dan sekaligus tidak terasing dari lingkungannya. Kegagalan dalam memahami konteks lokal akan menjadikan Darun Naim sulit diterima masyarakat di tengah usaha moderenitasnya. Ustadz Ridha dikenal memiliki pandangan terbuka terhadap zaman dan lingkungan, terwariskan kepada penggantinya. Sifat keterbukaan tersebut terepresentasikan dalam program kerja Darun Naim.

“Fenomena kemiskinan, keterpurukan ekonomi serta ancaman disintegrasi bangsa dan antar umat beragama merupakan dampak negatif dari krisis multidimensional yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia mulai dari krisis ekonomi, krisis kepercayaan sampai dengan krisis moral yang tercermin dari masih lemahnya penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia.

Hal seperti ini tentu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Bahwa Pondok Pesantren harus ikut memikul tanggung jawab ini. Pondok Pesantren semestinya inklusif dan proaktif dalam mengatasi krisis multi dimensional ini agar bangsa kita keluar dari keterpurukan. Pondok Pesantren seharusnya juga lebih aktif dalam kegiatan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan kemasyarakatan. Pondok Pesantren harus mampu membuktikan eksistensinya dalam rangka mengatasi krisis ekonomi yang berkepanjangan dan ancaman disintegrasi bangsa”.²⁸

Permasalahan di atas dipahami dan diterima sebagai suatu kenyataan sunnatullah, sehingga harus dikelola dengan baik untuk tujuan-tujuan kemaslahatan. Darun Naim dicita-citakan sebagai lembaga pesantren yang inklusif di tengah keragaman masyarakat Kalimantan Barat. Penetapan Bahasa Mandarin sebagai mata pelajaran muatan lokal merupakan petunjuk sikap keterbukaan pesantren terhadap keragaman dan sekaligus respon dinamika regional, karena bahasa tersebut bernilai strategis dalam format ekonomi di kawasan Asia. Penyelenggaraan kegiatan ekstra kulikuler drum band menambah kesan sikap terbuka Darun Naim terhadap perkembangan generasi, karena kegiatan tersebut sering tertolak di lingkungan Ponpes yang masih tradisional. Ponpes tersebut secara lebih lanjut diharapkan menjadi pesantren untuk seluruh suku di

Kalimantan Barat, tandai keterbukaan lembaga.

Darun Naim dan TIK

Secara nyata, teknologi informasi dan komunikasi(TIK) membantu manusia dalam membangun peradaban, tidak hanya itu, teknologi telah mempengaruhi dan menentukan tata peradaban. Di hampir semua tempat dan kebanyakan manusia di setiap harinya selalu bersentuhan dengan teknologi, hingga manusia tergantung dengan keberadaannya. Hal demikian itu dipastikan terjadi, karena banyak urusan mereka memerlukan keterlibatannya. Secara lebih lanjut, di dalam banyak hal, TIK turut menentukan bentuk dan pola aktivitas manusia, kecuali mereka yang berada di luar moderenitas zaman.

Secara ideal, TIK harus dikembangkan untuk tujuan kemaslahatan manusia, bukan sebaliknya. Ilmu tersebut harus didesain untuk membantu muslim dalam pelbagai urusan, mulai agama sampai sosial-kemasyarakatan. Semangat itu akan peroleh apresiasi tinggi dalam agama. Islam tidak perlu menutup diri terhadap perkembangan keilmuan moderen. Perlu ditegaskan bahwa kontek di atas menuntut kualitas keimanan muslim sebagai syarat penguasaannya, sehingga tetap terarah pada kemaslahatan. Penguasaan ilmu tersebut tanpa

²⁸ Lihat Tim, *Profil Pondok Pesantren..* hlm. 7.

mengandaikan kualitas iman berpotensi terjerumus dalam kemudharatan.

Ponpes Darun Naim telah memahami persoalan di atas dan menerjemahkannya dalam aktivitas kelembagaan. Di dalam rangka usaha itu, TIK didayagunakan untuk menemukan pelbagai manfaat praktis bagi sejumlah kepentingan penyelenggaraan pondok pesantren. Meskipun demikian, semua Ponpes belum menyadarinya. Padahal, ada banyak kemudahan dan nilai kelebihan yang ditawarkan teknologi tersebut untuk menyelesaikan urusan kelembagaan, baik dari timbangan efisiensi maupun efektifitas. Pendayagunaan TIK di lingkungan Ponpes tentu tidak seragam atau bervariasi sesuai keunggulan SDM dan cara pandang suatu lembaga pesantren terhadapnya. Darun Naim tidak ingin terbelakang dalam pemanfaatan TIK untuk mendukung kemajuan lembaga pesantrennya.

Urusan administratif, keuangan, kepegawaian telah diterapkan Ponpes ketika lembaga pendidikan keagamaan tersebut muncul di masyarakat. Kehadiran kelas muadalah semakin mendorong Ponpes untuk membuka diri terhadap profesionalitas tata kelola kelembagaan untuk terselenggara urusan administratif, kepegawaian, dan keuangan secara proporsional. Pada kontek itu, teknologi

informasi dan komunikasi ditarik dan didayagunakan pesantren. Pendaftaran santri, identitas santri, komposisi santri, penempatan kelas dan kamar santri, dan pembiayaan sebagai tahapan awal mereka memasuki pesantren menuntut lembaga untuk membuka lembaran administratif dan keuangan yang berbasis TIK. Di saat sama, teknologi tersebut mampu memberikan fasilitas lain untuk pemanfaatan dokumen guna kepentingan-kepentingan terkait, mulai penyimpanan, penyalinan, sampai pendistribusian.

Suatu hal dimaklumi umum bahwa pemerintah terkait hal di atas telah merumuskan suatu perundang-undangan sebagai standar nasional tentang penyelenggaraan pendidikan bidang tenaga administrasi. Bidang tersebut merupakan bagian mendasar bagi lembaga pendidikan, sehingga tidak dapat diabaikan, karena menyangkut sejumlah kepentingan. Di dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 tahun 2008 tentang standar tenaga administrasi dalam lembar lampirannya ditegaskan bahwa kepala administrasi, pelaksana urusan, urusan administrasi keuangan, urusan kepegawaian, sarana dan prasarana, kesiswaan, kurikulum, sampai administrasi hubungan antarlembaga dan pengarsipan harus memanfaatkan TIK dalam melaksanakan tugasnya untuk memenuhi

standar tata kelola administrasi yang baik. Pada batas itu, urusan administrasi kelembagaan mengharuskan penggunaan teknologi untuk pelbagai urusan dan kepentingan. Ketentuan tersebut secara lebih lanjut dijadikan pemerintah sebagai acuan penilaian akreditasi lembaga pendidikan.

Ponpes dengan sekolah muadalah di Pontianak dinilai kepala bidang pondok pesantren kantor kementerian agama Kalimantan Barat tidak dapat memisahkan diri dengan TIK. Penilaian tersebut didasarkan pada keberadaan sistem Education Management Information System (EMIS) Pendidikan Islam (Pendis) dan sejumlah kegiatan kelembagaan lain, seperti pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah. EMIS Pendis merupakan suatu sistem informasi berbasis web yang dikembangkan kementerian agama sebagai media peng-input-an data setiap madrasah yang dikelola untuk peroleh gambaran tentang perkembangan sekolah di Ponpes. EMIS menjadi keharusan bagi madrasah sebagai pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan kepada pemerintah. Sistem informasi tersebut tentu menuntut ketersediaan perangkat komputer dan dukungan aplikasi serta koneksi internet. Pada batas itu terpahami penjelasan kanwil kemenag Kalbar bahwa satu kegiatan EMIS memberikan dampak besar bagi

lembaga Ponpes dalam menyikapi kemajuan TIK. Hal sama pada pelaporan pertanggungjawaban BOS yang menggunakan aplikasi berbasis Excel. Proses pelaporan tersebut mendorong lembaga Ponpes mempelajari TIK untuk kepentingannya, tidak ada pilihan lain. Di dalam kepentingan itu, sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dilibatkan untuk memberikan pendampingan dalam pengenalan sistem pelaporan digital. Pada batas itu, sejumlah kebijakan pemerintah dinilai telah mendorong perubahan cara kerja Ponpes dalam mengelola lembaganya. Mereka secara bertahap digerakan untuk berubah sesuai tatanan masyarakat moderen yang berbasis kerja TIK.

Tabel 1
TIK di Darun Naim

Fasilitas TIK	Aplikasi TIK	Nilai Kegunaan	Produk TIK
Wifi Laboratorium Komputer 20 Printer Internet Infocus	WhatsApp, Words, Excel, Power point, Email, Web. blog, facebook.	Administrasi, Keuangan, Kepegawaian, UNBK, Emis, Media Sosial, Korespondensi, Storage dokumen, dan Penelusuran Informasi	Data ustadz, kependidikan, & santri, buku pedoman santri, data sarana dan prasarana, silabus, jadwal, soal ujian, raport, brosur ponpes, dokumen administrasi serta keuangan dalam bentuk file, digital, dan fisik.

Sumber: Survei dan hasil wawancara di Ponpes Darun Naim

TIK tampak telah dipilih pemerintah sebagai instrumen untuk pengembangan pendidikan di Indonesia, termasuk lembaga pendidikan pesantren. Kebijakan tersebut dirasa tegas pada sistem Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Pada sistem itu, ujian diselenggarakan dengan berbasis media komputer bukan berbasis kertas. Pelaksanaan UNBK di tahun 2018 ditargetkan Kemenag mencapai angka 100% sehingga tidak ada lagi madrasah mengadakan ujian dengan berbasis kertas. Pada praktiknya, UNBK dapat diklasifikasikan ke dalam tiga model, 1) Off-line, 2) Semi On-line, 3) Full On-line. Off-line berarti tidak terkoneksi secara langsung ke server pusat. Terminal ujian pada sistem Off-line berada di daerah. Selanjutnya, hasil ujian dikirim oleh server lokal ke server pusat melalui storage media, termasuk dalam urusan soal ujian. Semi On-line UNBK berarti telah terkoneksi ke server pusat melalui jaringan internet, tetapi masih difasilitasi server lokal sebagai terminal ujian. Sedangkan, Full On-line tidak lagi memerlukan terminal lokal, karena seluruh proses ujian terkoneksi dengan server pusat. Setiap komputer peserta ujian di daerah langsung terhubung ke server pusat di Jakarta, baik dalam pengiriman soal maupun hasil ujian. Proses UNBK secara praktis mendorong

setiap lembaga pesantren untuk mengenal TIK. Mereka tidak dapat menghindarinya, karena ujian nasional menjadi suatu keharusan.

Pada batas itu, Ponpes perlu memiliki sarjana bersertifikasi TIK atau tenaga kependidikan yang memiliki keahlian bidang keilmuan terkait. Sarjana tersebut diperlukan pesantren untuk kepentingan teknis penyelenggaraan UNBK, termasuk urusan EMIS, dan pelaporan BOS. Pada urusan UNBK memastikan pengelola pesantren memiliki sejumlah komputer dan spesifikasi server minimal. Mereka perlu memperhatikan masalah komposisi server dan client, koneksi internet, jaringan lokal area network, sampai detail-detail terkait komputer, processor, RAM, harddisk, operating system, dan UPS. Pengetahuan TIK demikian itu tentu diperlukan setiap pesantren untuk mendukung kelancaran UNBK karena tanpanya akan muncul masalah teknis yang berdampak serius.

Sejumlah persolan di atas telah direspon Darun Naim sebagai Ponpes moderen di Kota Pontianak. Mereka di masa awal cukup dibuat kerepotan dengan sejumlah kebijakan pemerintah terkait dengan pelaporan dana BOS, EMIS, dan UNBK. Hal sama pada urusan akreditasi madrasah yang juga menuntut detail

pelaporan kinerja lembaga.²⁹ Meskipun demikian, Darun Naim di tahun-tahun berikutnya cukup mampu menyelesaikan sejumlah pekerjaan tersebut. Tenaga kependidikan secara mandiri belajar TIK untuk mengurus tuntutan pekerjaan. Ponpes tersebut cukup cepat beradaptasi dengan tuntutan zaman. Di tengah konteks itu, komputer dan jaringan internet masuk ke dalam pesantren di Pontianak. Secara umum, mereka memerlukan teknologi tersebut untuk mendukung kerja lembaga, mulai laporan bantuan operasional sekolah sampai ujian nasional berbasis komputer. TIK menjadi suatu keharusan bagi Darun Naim untuk berkembang di masyarakat.

Pemikiran Darun Naim Tentang Internet Bagi Santri

Di tengah masyarakat Indonesia, internet tidak lagi menjadi barang langka.³⁰ Hal itu di awal tahun 2000 ditandai dengan menjamurnya usaha warung internet di kota-kota dan pelbagai pelosok daerah. Teknologi tersebut terus berkembang di masyarakat seiring dengan kebijakan pemerintah mencanangkan program

internet masuk desa.³¹ Internet masuk desa semakin mapan ketika diperkenalkannya ilmu dasar komputer sebagai ekstrakurikuler di jenjang pendidikan menengah, baik madrasah maupun sekolah umum. Di tingkat pendidikan tinggi, sejumlah kampus telah mengembangkan sistem pengajaran berbasis internet, dikenal dengan istilah e-learning. Di tengah kalangan Dunia Usaha, mereka malah cukup bergantung dengan internet, mulai dari kebutuhan terhadap informasi, periklanan, hingga urusan transaksi bisnis. Hal demikian terjadi di institusi pemerintahan, mereka juga berkepentingan terhadap internet, mulai urusan administrasi, sampai keperluan promosi pariwisata, ekonomi, dan budaya. Keseluruhan fenomena tersebut menggambarkan bahwa internet adalah bagian tidak terpisahkan dari masyarakat moderen. Setiap hand phone (Hp) android mereka hampir dapat dipastikan memiliki koneksi ke internet. Mereka dengan bantuan teknologi itu dapat melakukan banyak hal, tidak hanya urusan komunikasi.

Di konteks itu dunia melalui internet menjadi terintegrasi dalam suatu sistem

²⁹ Di tahun 2017 telah muncul wacana dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk membentuk lembaga yang bertugas memantau, mengevaluasi, mengkritisi proses pembelajaran di pesantren. Pada intinya, lembaga tersebut bertugas memberikan akreditasi kepada pesantren. Lihat www.pendis.kemenag.go.id.

³⁰ Detail internet lihat, Teguh Wahyono, *Serba-Serbi Blogger* (Yogyakarta: Gava Media, 20050, hlm. 11-15.

³¹ Kepala bagian urusan pondok pesantren kantor wilayah Kalimantan Barat menyesalkan berhentinya program internet masuk desa. Sebagai akibatnya, banyak tower internet yang terbelengkalai. Padahal, infrastruktur itu dapat dimanfaatkan untuk internet seluruh masyarakat, termasuk pesantren.

komunikasi, terbentuk dunia maya. Indonesia di Asia Tenggara dengan negara Eropa dalam dunia maya menjadi tidak lagi berjarak. Mereka dapat melangsungkan komunikasi secara audiovisual dalam waktu bersamaan, tidak ditemui di masa sebelumnya. Konstruksi ruang demikian itu tentu membuka persebaran atau perjumpaan budaya dan pelbagai hal. Internet menjadikan belahan dunia tidak lagi terasing dengan belahan lain. Mereka membangun komunikasi yang di dalamnya banyak hal dapat dilakukan bersama.

Suatu hal tidak terelakan banyak aktivitas manusia di era globalisasi yang dilangsungkan di dalam dunia maya atau ruang siber. Meskipun, aktivitas tersebut bersifat virtual, akan tetapi memiliki dampak secara nyata. Sebagai contoh populer adalah pencurian dana kartu kredit untuk melakukan aktivitas e-commerce di rentang tahun 2000-an. Pada batas itu, banyak aktivitas di dunia maya tidak seluruhnya bernilai positif.³²Selain hal di

atas terdapat masalah pornografi. Permasalahan tersebut di dunia maya dirasa serius karena dampaknya bagi masyarakat yang dinilai merusak moralitas bangsa. Di Indonesia, pornografi adalah salah satu masalah yang tetap aktual di tengah masyarakat. Mereka mulai memandang internet dengan kesan negatif. Permainan daring merupakan bagian lain dari internet yang memiliki daya tarik di tengah masyarakat, terutama remaja dan anak-anak. Permainan tersebut berbasis komputer yang didukung oleh jaringan internet. Selain itu, internet juga menyediakan pelbagai genre permainan yang bersifat off-line. Pengguna cukup men-down load satu kali untuk peroleh suatu permainan, lalu dapat memainkannya secara berulang-ulang di Hp android, tanpa bergantung pada jaringan internet. Permainan daring di ruang internet menjadi bagian dari suatu layanan hiburan. Di dunia maya tersebut, hiburan memiliki makna luas seiring dengan keragaman sajian yang ditawarkan internet. Chatting, googling, youtube, media sosial, seperti Facebook, Myspace, Orkut, Twitter, Friendster merupakan ruang di dunia maya yang dapat memberikan hiburan kepada pengguna internet. Musik online tidak ketinggalan di internet. Banyak situs di dunia maya yang

³² Kejahatan di dunia maya melahirkan ide penegakan hukum yang dikenal dengan istilah cyber law. Secara konsensus internasional, pengertian cyber law merupakan istilah hukum terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Cyber law memiliki kesejajaran makna dengan hukum telematika. Di dalam istilah lain, cyber law dikenal dengan nama law of information technology dan virtual world law atau hukum mayantara. Lihat Teguh Wahyno, *Etika Komputer dan Tanggung Jawab Profesional di Bidang Teknologi Komputer*. Yogyakarta: Andi, 2006.

menyediakan aneka musik dalam pelbagai jenisnya. Internet bagi pengguna yang berpengalaman menjadi surga hiburan, karena keragaman yang ditawarkannya.

Persoalan di atas tentu menjadi perhatian Darun Naim di Pontianak. Mereka melihat sejumlah persoalan tersebut sebagai sisi negatif internet, karena berdampak secara langsung terhadap akal, akhlaq, dan tata adab muslim, terutama kalangan generasi muda. Internet di batas itu memiliki potensi kuat melalaikan mereka dari waktu dan kewajiban. Di saat sama, internet menawarkan nilai-nilai asing yang sering dianggap bertentangan dengan Islam, baik terkemas dalam filem, lagu, permainan, maupun berita. Internet secara lebih lanjut dianggap sebagai corong bagi propaganda pelbagai ajaran. Sementara, internet dalam kasus pornografi mengajak kepada kemaksiatan. Sejumlah persoalan tersebut ditangkap pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Ponpes Darun Naim. Hal tersebut tentu didasarkan kepada pengamatan atau temuan-temuan di tengah masyarakat.

Penilaian di atas tidak tunggal, karena internet memiliki sisi lain. Sisi tersebut diakui secara bersama bahwa internet memiliki ruang bernilai positif atau mengandung kemaslahatan. Mereka melihat teknologi terpenting di era globalisasi tersebut tidak secara

keseluruhan bernilai merusak bagi masyarakat. Nilai-nilai kemaslahatan memiliki ruang di dunia maya sebagaimana ruang bagi nilai kebalikannya. Pada batas itu, mereka menilai internet dalam timbangan relativitas. Internet dalam aktualitas nilainya tergantung tangan penggunanya.

Tabel 2
Pandangan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Lembaga Ponpes Darun Naim Terhadap Internet

Nama Ponpes	Nilai Positif	Nilai Negatif	Relatif
Darun Naim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka perkenalan dengan dakwah ulama luar negeri 2. Memberikan informasi luas 3. Wawasan tentang dunia luar 4. Jendela Dunia Islam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budaya asing yang tidak selaras dengan Islam. 2. Merusak pikiran 3. Habiskan waktu-kecanduan 4. Pornografi dan kultur Barat yang tidak islami 5. Merusak generasi karena kurang fokus studi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tergantung penggunaan

Sumber: wawancara di Ponpes Darun Naim

Moderenitas Darun Naim memiliki pengaruh terhadap cara pandang lembaga pendidikan keagamaan tersebut terhadap teknologi informasi dan komunikasi bagi pengelolaan lembaga. TIK secara lebih lanjut diterjemahkan untuk kepentingan santri dalam bentuk ekstrakurikuler Desain Grafis. Mata pelajaran tersebut sekaligus dirancang sebagai respon terhadap kebutuhan zaman pada santri.

Tabel 3
TIK di Darun Naim

Fasilitas TIK	Aplikasi TIK	Nilai Kegunaan	Produk TIK
Wifi	WhatsApp, Words	Administrasi,	Data ustadz, kependidikan,
Laboratorium	Excel, Powerpoint,	Keuangan,	& santri, buku pedoman
Komputer 20	Email, Web.	Kepegawaian,	santri, data sarana dan
Printer	blog, facebook.	UNBK, Emis,	prasarana, silabus, jadwal,
Internet		Media Sosial,	soal ujian, raport, brosur
Infocus		Korespondensi,	ponpes, dokumen
		Storage dokumen,	administrasi serta keuangan
		dan Penelusuran	dalam bentuk file, digital,
		Informasi	dan fisik.

Sumber: Survei & wawancara di Darun Naim

Kemampuan Darun Naim mendayagunakan TIK memberikan pengaruh terhadap penilaian tenaga pendidik dan kependidikan pada internet dalam relasinya bagi santri. Mereka secara optimistik menilai internet memiliki nilai manfaat bagi pembelajaran santri di pesantren.

Tabel 4
Penilaian Pendidik dan Kependidikan Darun Naim
Tentang Internet Bagi Santri

Penilaian Pendidik dan Kependidikan	Komposisi	Alasan	Vol
Santri Perlu Internet	12	Literasi TIK	2
		Buka wawasan & Pengetahuan	2
		Sarana dalam pembelajaran	3
		Media Dakwah	4
		Jendela perkembangan dunia	1
Santri Tidak Perlu Internet	0	-	0

Sumber: Wawancara di Darun Naim

Keseluruhan hal tersebut di atas tentu dipahami sebagai bagian dari usaha untuk membekali santri kembali ke tengah masyarakat. Keterbukaan Kalimantan Barat terhadap ASEAN Free Trade Area menuntut sumber daya manusia muslim yang berkualitas secara keagamaan dan sekaligus keilmuan umum. Tantangan itu dirasa nyata ketika melihat kecenderungan tatanan globalisasi yang membuka kompetisi di semua sektor usaha. ASEAN-China Free Trade Area menambah tantangan bagi muslim di bidang jasa

untuk berhadapan dengan sumber daya manusia dari negara-negara lain. Santri tanpa kemampuan tambahan akan terpinggirkan ke tepi zaman, karena kalah kompetisi. Internet bagi santri di batas itu dipahami sebagai usaha memajukan mereka agar mampu berkompetisi di masyarakat.

Penilaian tenaga pendidik dan kependidikan tentang internet di atas peroleh afirmasi dari santri. Mereka menilai bahwa internet di tengah era globalisasi adalah hal penting bagi pelajar pesantren dalam rangka membuka wawasan tentang dunia internasional. Hal demikian itu dalam konteks pesantren tentu perlu bimbingan ustadz agar bernilai produktif bagi proses pembelajaran di Ponpes. Santri dan tenaga pendidik dan kependidikan memiliki penilaian sama terhadap internet bagi pelajar di pesantren Darun Naim.

Tabel 5
Penilaian Santri Terhadap Internet

Pendapat Santri	Komposisi	Alasan	Vol
Santri Perlu Internet	48	Melengkapi buku	1
		Buka wawasan	19
		Bantu tugas sekolah	5
		Jendela perkembangan dunia	1
		Media sosial	2
		Tidak ketinggalan zaman	2
		Ilmu pengetahuan	9
		Berita dunia	5
		Informasi di masyarakat lokal	1
		Media Dakwah ulama	3

Santri Tidak Perlu Internet	2	Cukup ustadz	1
		Hindari ketergantungan internet	1

Secara kelembagaan, Darun Naim memiliki kebijakan berbeda dari harapan santri, termasuk tenaga pendidik dan kependidikan. Ponpes tersebut tidak menyediakan internet bagi santri. Hal itu berkaitan dengan sejumlah alasan, terutama sarana dan prasarana pendukungnya.

Suatu hal dipastikan Darun Naim tidak mengizinkan akses internet secara bebas bagi santri, karena mereka sedang dalam proses belajar ilmu agama dan umum. Mereka tidak sekedar ditempa untuk menjadi pintar melainkan sekaligus dibentuk karakter-akhlaqnya. Oleh sebab itu, akses internet secara bebas tidak diizinkan. Mereka dikuatirkan akan lalai atau tidak konsentrasi terhadap beban kewajiban, baik berupa perintah maupun larangan. Seperangkat aturan yang menjadi kewajiban santri tidak dirumuskan kecuali dalam rangka membentuk mereka menjadi pintar dan berakhlaq mulia. Internet secara bebas bagi santri berpotensi kuat mengeluarkan mereka dari skema kurikulum Darun Naim.

Sejumlah tenaga pendidik dan kependidikan dalam konteks pemahaman di atas merekomendasikan suatu regulasi bagi santri dalam mengakses internet. Peraturan

dibuat dalam rangka mengantisipasi potensi negatif internet bagi pengguna. Di antara pokok pikiran dalam regulasi tersebut meliputi penjadwalan, batasan waktu penggunaan, terkontrol atau terpantau, dan tidak disalahgunakan, seperti akses ke situs bermuatan pornografi. Kelas laboratorium dapat menjadi solusi terhadap penerjemahan rekomendasi regulasi. Seperangkat aturan dalam kepentingan itu harus didesain sedemikian rupa guna mengatur dan mengarahkan santri agar mereka tidak menyalahgunakan internet.

KESIMPULAN

Darun Naim di Pontianak menjadi pesantren terdepan dalam modernisasi di ranah tata kelola, penyelenggaraan pendidikan, dan administrasi. Teknologi informasi dan komunikasi sejak awal digunakan untuk mendukung modernisasi dalam pengelolaan lembaga. Tradisi moderen telah dimulai dari awal kelahiran. Padahal, Ponpes Pontianak di masa itu tumbuh dan berkembang sebagai lembaga pendidikan keagamaan tradisional. Meskipun demikian, orientasi keagamaan di Ponpes tersebut masih berkiblat pada tradisi pesantren salafiyah. Di batas itu, Darun Naim sama dengan pesantren lainnya. Sekolah formal muadalah berbasis kurikulum nasional, ekstrakurikuler bidang keilmuan TIK, dan mata pelajaran lokal

bahasa Mandarin digagas untuk menegaskan diri sebagai Ponpes moderen. Kebijakan tersebut tentu menjadikan Darun Naim berbeda dengan lembaga pesantren lain di Pontianak.

Tantangan terbesar Darun Naim sebagai lembaga Ponpes moderen adalah pendayagunaan internet. Internet merupakan teknologi yang mengandung di dalamnya pelbagai potensi, baik positif maupun negatif. Pornografi, penyebaran budaya, dan pelbagai kejahatan di dunia maya menahan Darun Naim untuk memberikan internet kepada santri. Mereka dinilai akan terdampak potensi negatif internet, sehingga merusak proses pendidikan di pesantren. Ponpes sebagai tempat murid mendalami ilmu agama dinilai akan menemui masalah ketika dihadapkan pada pelbagai potensi di internet. Di saat sama, sarana dan prasarana Ponpes belum mampu memformulasikan pendidikan TIK yang di dalamnya terkandung pembelajaran tentang internet. Pada batas itu, Ponpes Darun Naim sebagai lembaga moderen menemui tantangannya.

Di saat sama, tenaga pendidik dan kependidikan menilai positif internet bagi santri untuk kepentingan keilmuan dan pembelajaran. Hal demikian itu selarasa dengan keinginan santri yang menghendaki ketersediaan internet untuk

menunjang proses pembelajaran dan pembaruan pendidikan yang berorientasi pada wawasan internasional. Sementara, potensi mafsadat pada teknologi tersebut dapat diantisipasi melalui regulasi terhadap penggunaan internet. Hal mafsadat tersebut tidak perlu menghadang internet masuk Ponpes.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Suryadharma. (2013). *Epistemologi Kajian Islam Indonesia: Memperluas Horizon Kajian Islam, Menjawab Tantangan Perubahan*. Malang: UIN Maliki.
- Asrohah, Hanum. (1999). *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos.
- Asyhari, Ardian. dkk. (2017). "Respon Ponpes Diniyah Putri Terhadap Modernisasi Pendidikan Islam" dalam *Tadris: Journal Pendidikan Islam*, Vol. 12, No. 2, 2017, (ejournal.stainpamekasan.ac.id.).
- Bin Abbas, Rivai. (1984). *Riwayat Hidup al-Marhum al-Fadhil al-Haji Ismail Mundu*. Pontianak.
- Dhofier, Zamakhsyari. (1997). *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Kiai*, Jakarta: LP3ES.
- Abu Bakar dan Fatimah. (2018). *Habib Shaleh al-Haddad: Jihad dalam Dakwah Islamiyah di Kalimantan Barat*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Hanvitra, "Ketika Internet Menguasai Dunia" dalam <https://www.kompasiana.com>.
- Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kota Pontianak. (2018). *Data Pondok Pesantren Se-Kota*

- Pontianak Tahun 2018. Pontianak: Kemenag Kota Pontianak.
- Mas'ud, Abdurrahman. (2000). "Pesantren dan Walisongi: Sebuah Interaksi dalam Dunia Pendidikan" dalam: *Islam dan Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Gama Media.
- Nur'aeni, Zaki. (2005). "Daarut Tauhid: Modernizing a Pesantren Tradition" dalam *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies* Vol. 12, No. 3, 2005.
- Penyusun, Tim. (1440 H). *Jadwal al-Dirasah al-Diniyah Bi Ma'had Darun Naim Amu al-Dirasiy 1439/1440*. Pontianak: Ponpes Darun Naim, tnp. Tahun.
- Penyusun, Tim. (2006). *Etika Komputer dan Tanggung Jawab Profesional di Bidang Teknologi Komputer*. Yogyakarta: Andi.
- Penyusun, Tim. (2018). *Buku Panduan Santri Baru Ponpes Darun Naim Tahun Pelajaran 2018/2019*. Pontianak: Ponpes Darun Naim. t.tp.
- Penyusun, Tim. (2018). *Jadwal Kegiatan Santri Baru Ponpes Darun Naim Tahun Pelajaran 2018/2019*. Pontianak: Ponpes Darun Naim, tnp.
- Penyusun, Tim. (2018). *Kurikulum Madrasah Diniyah Ponpes Darun Naim Putra Tahun Pelajaran 2018/2019*. Pontianak: Ponpes Darun Naim, tnp.
- Penyusun, Tim. (tt). *Brosur Pondok Pesantren Darun Naim*. Pontianak: Ponpes Darun Naim, tnp.
- Penyusun, Tim. (tt). *Profil Pondok Pesantren Darun Naim*. Pontianak: Ponpes Darun Naim, tnp.
- Rahardjo, Dawam. (1982). "Gambaran Pemuda Santri: Penglihatan dari Jendela Pesantren Pabelan" dalam Taufik Abdulah, *Pemuda dan Perubahan Sosial*. Jakarta: LP3ES.
- Rahman, Ansar. (1991). *Sejarah Perjuangan Rakyat Kalimantan Barat 1908-1950*. Pontianak: Pemerintah Daerah Tk. I Kalbar.
- So'an, Sholeh. (2002). *Tahlilan: Penelusuran Historis Atas Makna Tahlilan di Indonesia*, Bandung: Agung Ilmu.
- Soekanto, Soerjono. (2000). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Srimulyani, Eka, "Islamic Schooling In Aceh: Change, Reform, and Local Contexts", *Studia Islamica*, Vol. 20 Number 3 (2003), [Pp. 1-22].
- Taufiq Abdurrahman, Ahmad. "Pesantren Moderen dan Pendidikan Multikulturalisme: Observasi atas Sistem Pendidikan di Ponpes Moderen Darussalam Gontor dan al-Amien Preduan" dalam (www.academia.edu)
- Undang Undang Republik Indonesia No. 11 Thn. 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Van Bruinessen, Martin. (1997). *Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Wahyono, Teguh. (2000). *Serba-Serbi Blogger*. Yogyakarta: Gava Media.
- Zulkifli, (2018). "Aktivitas Dakwah Maharaja Imam Sambas Haji Moehammad Basioeni Imran" dalam Orasi Ilmiah: Yudisium Sarjana Fakultas Adab dan Dakwah, tidak diterbitkan, Pontianak, 19 Juli 2018.